

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sektor publik di Indonesia saat ini, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan peraturan yang menuntut pemerintah pusat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Jaladri & Riharjo, 2017). Akuntabilitas pemerintah dianggap penting karena akuntabilitas yang baik sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Budhi Purwantoro Jati, 2019).

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. Standar akuntansi pemerintah merupakan sesuatu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sesuai dengan UU Pasal 32 No. 17 Tahun 2003 tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (BPK, 2003). Ditegaskan pula dalam PP pasal 4 ayat (1) No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis Akrua (BPK, 2010). SAP berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis Akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Mudrikah & Ali, 2020). Sementara itu, akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrua waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Satrio et al., 2016).

Hasil penelitian terdahulu seperti Makaleleg et al., 2023 menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kabupaten Minahasa Selatan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Astusi 2024 menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Permasalahan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah sangat perlu diperhatikan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih

dalam. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang SAP dan kurang baiknya penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dilakukan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat didefenisikan masalah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu: bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari proposal ini adalah memberikan kontribusi untuk memperkuat konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang SAP sebagai alat monitoring untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga diharapkan akan meningkat kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah daerah mencakup peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan implementasi standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.